

TAJUK RENCANA

Ditunggu, Kapan Bisa Mulai Umrah?

SUDAH hampir sebulan info dibukanya kembali umrah dari Indonesia kita terima. Info ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam konferensi persnya, 8 Oktober lalu, yang mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mendapatkan nota diplomatik dari Arab Saudi terkait telah dibukanya kembali umrah bagi jemaah asal Indonesia.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan soal pemberangkatan umrah dari Indonesia. Berbagai pihak terkait belum mengetahui kapan bisa mulai lagi memberangkatkan jemaah umrah. Lantas secara detail apa saja persiapan yang harus dilakukan. Begitu juga belum mengetahui, berapa kisaran biaya bagi masyarakat yang akan umrah. Padahal, kepastian mengenai hal-hal tersebut sangat ditunggu oleh banyak pihak.

Karena itu tidak heran kalau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Daerah Istimewa Yogyakarta mengingatkan pemerintah untuk segera menyelesaikannya, termasuk hal-hal teknis yang masih menjadi kendala antara Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan umrah, (KR, Kamis 4/11). Sebab, dengan terselesaikannya hal-hal tersebut maka akan bisa ditindaklanjuti dengan membuat perencanaan pemberangkatan umrah.

Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu lalu Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Nizar Ali, sudah berpesanan kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar segera melakukan penyesuaian harga referensi. Sebab, umrah di masa pandemi jauh berbeda dengan masa normal. Perlu penyesuaian harga referensi umrah. Karena itu harga referensi harus dihitung secara cermat dan detail.

Komponen yang mempengaruhi an-

tara lain menyangkut keharusan karantina, konon sampai 14 hari, sehingga biayanya cukup lumayan. Juga menyangkut vaksinasi dan biaya swab PCR, selain juga masalah biaya transportasi dan akomodasi yang kemungkinan juga naik.

Namun hingga saat ini belum ada informasi resmi soal referensi biaya umrah. Masyarakat tahunya biaya umrah akan naik. Bahkan ada yang sudah mengkalkulasikan, yang konon biaya umrah masa pandemi kenaikannya bisa mencapai 30% hingga 50% dari harga referensi sebelumnya Rp 26 juta perorang. Dengan banyaknya beredar info-info tak resmi ini membuat banyak orang kebingungan.

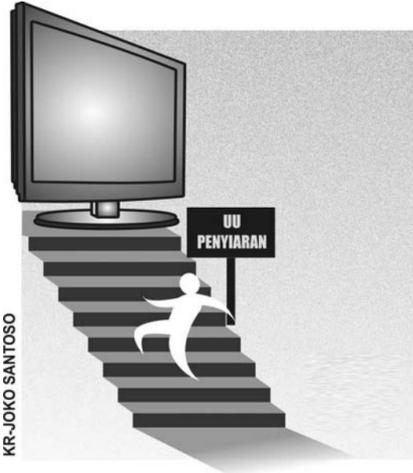
Karena itu sudah semestinya kalau pemerintah, khususnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, segera mengklarifikasi masalah ini. Untuk itu Dirjen PHU dan jajarannya bisa berdialog dengan para penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Untuk mengumpulkan mereka kiranya tidak sulit, karena mereka sudah mempunyai asosiasi yang mawadahi. Dari forum bersama PPIU juga bisa dicari masukan dan dibahas berbagai hal terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Hal lain yang perlu segera diselesaikan adalah masalah barcode vaksin Indonesia yang informasinya masih belum bisa dibaca di Saudi Arabia.

Kita berharap, soal keberangkatan umrah segera ada kepastian, sehingga umat Islam Indonesia bisa segera beribadah lagi di Haramain (Masjidil Haram dan Masjid Nabawi). Sebab kalau kita amati, kedua di kedua masjid suci tersebut sudah ramai lagi dengan banyaknya jemaah yang beribadah. Hanya sayangnya belum ada yang berangkat dari Indonesia. Padahal sudah banyak yang merindukannya. Semoga PR pemerintah yang satu ini bisa segera terselesaikan. □

Menanti Revisi UU Penyiaran

Masduki

Sepanjang dua puluh tahun terakhir, kedua lembaga ini dilanda berbagai krisis manajemen, keuangan, dan konflik kepemimpinan tak berkesudahan. Di luar RRI dan TVRI, kiprah lembaga penyiaran publik lokal sebagai media publik di tingkat daerah juga minimalis.



KR-JOKO SANTOSO

MEMASUKI November, agenda prioritas DPR untuk merevisi UU No 32/2002 tentang Penyiaran tampak belum berjalan signifikan. Komisi I DPR pada akhir Agustus 2021 yang lalu sebenarnya telah menggelar rapat untuk penjadwalan revisi UU ini. Namun rapat lebih lanjut yang lebih teknis dan terjadwal belum dibuka ke publik. Setelah terhenti selama lebih dari enam tahun, revisi UU yang merupakan payung besar tata kelola penyiaran kembali bergulir.

Sepanjang tahun 2018-2020, proses legislasi UU ini sempat tertunda panjang karena perbedaan pandangan terkait model manajemen frekuensi digital terrestrial. Pada tahun 2020, kontroversi masalah ini mencapai antiklimaks. Pemerintah dan DPR menyetujui pengaturan digitalisasi penyiaran pada UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020.

Pasca pengesahan UU Cipta Kerja dan rapat Komisi I bulan Agustus lalu, pertanyaan yang muncul adalah: bagaimanakah skenario substansi revisi yang masih akan dilakukan? Apa saja problem penyiaran nasional mutakhir yang mendesak untuk diadopsi dalam revisi UU? Tulisan ini ingin menyodorkan salah satu agenda prioritas. Yaitu, perlunya regulasi yang mendorong reformasi tata kelola lembaga penyiaran publik (LPP). Saat ini mandat lembaga penyiaran publik diemban oleh RRI, TVRI dan LPP Lokal.

Belum Tampak

Apabila merujuk pada UU 32/2002 pasal 4, maka pemegang mandat LPP adalah RRI, TVRI dan LPP Lokal. Setelah melewati lebih dari 20 tahun, kedua media warisan Orde Baru ini belum tampak menjadi pemain utama yang diperhitungkan, baik oleh kompetitor maupun publik. Indikasinya bukan hanya pada rating penonton yang rendah, tetapi absennya posisi kedua media sebagai rujukan media percakapan isu publik nasional.

yang pluralistik dan kompetitif.

'Gajah Tidur'

Saat ini pendapatan bisnis dari siaran berbasis teknologi analog makin menurun, dilibas layanan siaran berbasis internet. Kita melihat pengelola televisi komersial analog semakin agresif mengembangkan layanan digital (internet dan media sosial). Mereka telah melakukan konvergensi, meleburkan tradisi produksi dan distribusi tradisional-terestrial ke dalam tradisi baru berbasis platform digital. Apakabar RRI dan TVRI? Tanpa regulasi baru sebagai payung hukum menuju transformasi digital, kedua media akan berjalan lambat.

RRI dan TVRI di Indonesia ibarat 'gajah yang tertidur panjang', didera persoalan internal. Ibarat gajah, postur tubuh fisik RRI dan TVRI tampak paling besar dibanding media komersial. Ia memiliki infrastruktur ter lengkap dan terluas. Adopsi teknologi layanan digital sebetulnya mulai dilakukan seperti membuat aplikasi RRI Play Go dan TVRIKlik. Namun, karena problem birokrasi dan postur tubuh yang berat, langkah ini tampak hanya penambahan aplikasi teknologi tanpa inovasi konten yang baik. Revisi UU Penyiaran sangat ditunggu agar LPP di Indonesia dapat secepatnya teraja dari tidur panjang.

**) Dr Masduki, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Memaksimalkan PTMT di SMK

PEMBELAJARAN Tatap Muka Terbatas (PTMT) ini membawa angin segar bagi dunia pendidikan, khususnya pembelajaran di tingkat sekolah menengah kejuruan. Karena seperti kita ketahui bahwa SMK adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya, sehingga dalam proses belajar mengajarnya tidak cukup hanya menggunakan teori yang ada. Melainkan harus mampu praktik terjun langsung menghadapi barang atau jasa yang sesuai bidang kejuruan.

Saat ini telah dilakukan uji coba pertemuan tatap muka terbatas, maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memilih pembelajaran hybrid learning. Model pembelajaran yang dilakukan adalah memadukan teori secara daring dengan praktik saat tatap muka. Untuk mengatasi *lost generation* di dunia pendidikan tingkat kejuruan ini dengan memperhatikan prinsip pembelajaran selama pandemi Covid-19, yaitu pertama, orientasi pada anak, maknanya bahwa di era pandemi ini guru tidak hanya berorientasi pada pencapaian kurikulum saja melainkan harus berorientasi kepada siswa dengan mempertimbangkan proses pembelajaran yang terjadi.

Kedua, pemberian umpan balik, pada proses pembelajaran diberikan sebagai respons atas kinerja siswa. Serta memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan pembelajaran, guru juga perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami indikator dari tingkat penguasaan tujuan pembelajarannya, baik secara lisan, tertulis maupun dalam bentuk lainnya.

Ketiga, pembelajaran bermakna dan diferensiasi, guru merancang pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan serta terdiferensiasi dengan merancang kuriku-

lum dan instruksi pembelajaran bagi siswa yang beragam kemampuannya, minatnya serta kebutuhan belajarnya. Keempat, orientasi pada keterampilan hidup, merancang pembelajaran dengan lebih bermakna bagi siswa karena hal tersebut dialami siswa pada kehidupan nyata sehingga siswa lebih paham.

Kelima, inklusif dengan mempertimbangkan kondisi siswa sistem penyelenggaraan pendidikan memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan siswa lain pada umumnya.

Kemudian alternatif pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dapat digunakan pada waktu KBM tatap muka terbatas agar efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan adalah pembelajaran di luar kelas. Guru dapat memanfaatkan pembelajaran di luar kelas untuk mengoptimalkan sirkulasi udara serta menghindari kerumunan massa pada suatu tempat, siswa juga akan merasakan lebih nyaman dalam belajar. Hal tepat diterapkan pada pembelajaran di sekolah kejuruan pada mapel produktif yang memerlukan praktik terutama praktik di bengkel atau di workshop.

Selain itu project based learning, guru dapat mengimplementasikan pembelajaran berbasis project based learning untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, meningkatkan keingintahuan yang tinggi, critical thinking dan kolaboratif. Dengan alternative pembelajaran tersebut diharapkan dapat memaksimalkan proses pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah menengah kejuruan. □

**) Mey Wulandari SPd Si, Guru Produktif TKR SMK N 3 Yogya.*

Digitalisasi Manajemen Stok Pupuk

Jusuf Irianto

DEMI kesejahteraan petani, stok pupuk harus dipastikan dalam jumlah aman khususnya pada masa tanam yang dimulai akhir tahun hingga awal 2022. Problem mendasar yang dihadapi petani adalah melonjaknya biaya produksi akibat kelangkaan pupuk dan bahan baku lain di masa tanam. Pemerintah berupaya memastikan stok pupuk sesuai kebutuhan. Kementerian Pertanian menegaskan stok pupuk, khususnya pupuk subsidi, untuk petani di berbagai wilayah di Indonesia menjelang musim tanam kedua tahun ini dalam jumlah cukup.

Sementara PT Pupuk Indonesia memastikan alokasi pupuk sesuai kebutuhan tiap wilayah. Stok pupuk bersubsidi di Jawa Tengah, misalnya, cukup memenuhi kebutuhan musim tanam. Ada 125.400 ton stok pupuk terdiri Urea 79.919 ton, Nitrogen Phosphate Kalium (NPK) Phonska 16.373 ton, Super Phosphate-36 (SP-36) 9.515 ton, Zvavelvuure Ammonium (ZA) 6.918 ton, dan pupuk organik mencapai 17.750 ton.

Berdasar upaya strategis pemerintah serta data alokasi PT Pupuk Indonesia, kekuatan petani terhadap kelangkaan pupuk dapat diredam. Kondisi psikologis petani pun diharapkan mencapai level terbaik menyongsong masa tanam. Pupuk tetap merupakan bahan produksi dengan peran sangat penting. Karena itu, manajemen produksi dan distribusi pupuk harus dirancang seefektif mungkin.

Manajemen Pupuk

Pupuk merupakan komponen penting pengembangan budi daya pertanian. Sebab itu, komitmen pemerintah mengamankan stok pupuk bagi kebutuhan petani harus didukung sistem manajemen yang efisien dan efektif. Manajemen pupuk bertujuan meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui proses produksi pupuk secara optimal. Dari sisi produksi, jumlah pupuk yang dihasilkan industri nasional sangat kondusif. Pada 2020 lalu Indonesia mencapai

28000:2007/SNI ISO 28000:200 dalam bentuk *electronic security system* dan pemetaan zonasi. Sistem ini mampu mengantisipasi gangguan produksi dan distribusi.

Pupuk Kaltim juga menyiapkan strategi mengamankan stok pupuk berbasis lokasi yaitu pabrik, pusat distribusi, dan gudang. Stok pupuk dipastikan aman pada waktu yang tepat dan well prepared menjelang musim tanam. Teknologi digital berupa *distribution planning and controlling system* (DPCS) yang diterapkan dunia industri pun mampu membuat simulasi distribusi dan sistem pengendalian alokasi pupuk secara tepat. Sehingga memudahkan melacak stok pupuk di berbagai wilayah.

Dengan digitalisasi manajemen stok pupuk, diharapkan masalah petani dapat diatasi. Pesan Presiden Joko Widodo agar digitalisasi harus Indonesia-sentris pun dapat diwujudkan dan bermanfaat bagi petani hingga di pelosok desa.

**) Prof Dr Jusuf Irianto MCom, Guru Besar Dep Administrasi Pub;ik FISIP Universitas Airlangga.*

Pojok KR

Penyiksaan napi, Komnas HAM turun tangan.
-- Ungkap dan beri sanksi yang terלבat.

Disabilitas bukan penghalang prestasi.
-- Bisa dibuktikan di ajang Peparnas.

Tetap waspada munculnya gelombang ketiga.
-- Tak boleh lengah sedikitpun terhadap Covid-19.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Drs H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langanan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk23@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.